

KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dapat terselesaikan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 3 April 2018, Badan Pemeriksa Keuangan RI menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017 yang memuat ringkasan dari 449 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri 6 LHP Keuangan, 239 LHP Kinerja, dan 204 LHP Dengan Tujuan Tertentu, yang berisi hasil pemeriksaan:

1. Opini atas 6 Laporan Keuangan (5 LKPD Tahun 2016 dan 1 Laporan Keuangan Penutup Badan Pengelola Dana Abadi Umat);
2. Simpulan kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah serta; dan
3. Simpulan atas penerapan Sistem Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

IHPS II Tahun 2017 disajikan berdasarkan pengelompokan pengelola anggaran, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD, BLUD, dan BUMN serta badan lainnya.

Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan yang dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan; pemeriksaan kinerja untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas; dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Ringkasan dan Telaahan ini dapat dijadikan bahan untuk melakukan pendalaman atas kinerja Mitra Kerja Komisi dalam

melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja Kementerian/Lembaga dan Badan Publik lainnya.

Dalam buku ini tersaji ringkasan laporan pemeriksaan BPK untuk Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi V yang terdiri dari 4 (empat) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan 2 (dua) Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja, yaitu:

1. Kementerian/Lembaga yang masuk dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah:
 - a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pengadaan Barang dan Jasa TA 2013-2015 pada Ditjen Bina Marga dan Sumber Daya Air di Sumatera Barat, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Kalimantan Timur *dengan 26 temuan senilai Rp175.209.510.000,00;*
 - b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pengadaan Barang dan Jasa TA 2013-2015 pada Ditjen Bina Marga dan Sumber Daya Air di Maluku *dengan 8 temuan senilai Rp79.647.100.000,00;*
 - c. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pengadaan Barang dan Jasa TA 2013-2015 pada Ditjen Bina Marga dan Sumber Daya Air di Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat *dengan 13 temuan senilai Rp39.300.620.000,00;*
 - d. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pengadaan Barang dan Jasa TA 2013-2015 pada Ditjen Bina Marga dan Sumber Daya Air di Papua dan Papua Barat *dengan 25 temuan senilai Rp741.335.630.000,00.*
2. Untuk Kementerian/Lembaga yang masuk dalam Pemeriksaan Kinerja adalah:
 - a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pengelolaan Operasional Jalan Tol Atas Kelancaran

Lalu Lintas dan Kebijakan Tarif pada Kementerian PUPR, BPJT, dan BUJT di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten *dengan 15 temuan*,

- b. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pemeriksaan Atas Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Tahun 2016 s.d. Semester I 2017 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Pemerintah Provinsi terkait di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sulawesi Utara *dengan 30 temuan*.

Dalam penyusunan Ringkasan dan Telaahan ini Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara mengundang Para Pakar/Peneliti serta Auditorat Keuangan BPK RI untuk berdiskusi dan kami juga menyajikan dalam bentuk *infografis* yang dapat memudahkan pemahaman tentang hasil pemeriksaan BPK RI yang terperinci dan memuat tentang Penjelasan, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Akibat, dan Rekomendasi.

Akhir kata kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan ini.

Jakarta, April 2018

DRS. HELMIZAR
NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	i
Daftar Isi.....	iv
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
Infografis	1
PDTT atas pengadaan barang dan jasa TA 2013-2015 pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat di Sumatera Barat, Jambi, Riau, Kep. Riau, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo Dan Kalimantan Timur	2
Tujuan dan Hasil Pemeriksaan.....	3
Daftar Temuan.....	3
A. Direktorat Jenderal Bina Marga.....	6
B. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.....	63
PDTT atas pengadaan barang dan jasa TA 2013-2015 pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat di Maluku	79
Tujuan dan Hasil Pemeriksaan.....	80
Daftar Temuan.....	80
A. Direktorat Jenderal Bina Marga.....	82
B. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.....	99
PDTT atas pengadaan barang dan jasa TA 2013-2015 pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat di Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat	105
Tujuan dan Hasil Pemeriksaan.....	106
Daftar Temuan.....	106
A. Direktorat Jenderal Bina Marga.....	108
B. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.....	142

PDDT atas pengadaan barang dan jasa TA 2013-2015 pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat di Papua dan Papua Barat	153
Tujuan dan Hasil Pemeriksaan.....	154
Daftar Temuan.....	154
A. Direktorat Jenderal Bina Marga.....	157
B. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.....	206
Pemeriksaan Kinerja atas kelancaran lalu lintas dan kebijakan tarif pada Kementerian PUPR, BPJT, dan BUJT di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten TA 2014-2016	228
Infografis.....	228
Daftar Temuan.....	229
B. Pelaksanaan Operasional Jalan Tol.....	231
C. Pemantauan dan Evaluasi Operasional Jalan Tol.....	238
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	
Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Tahun 2016 s.d Semester I Pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Pemerintah Provinsi di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sulawesi Utara	242
Infografis.....	242
Daftar Temuan.....	243
A. Regulasi dan Perencanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.....	246
B. Kegiatan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.....	268
C. Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Kegiatan Pendampingan.....	276
D. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.....	296

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
SEMESTER II TAHUN 2017
KEMENTERIAN PUPR



PENGELOLAAN BELANJA

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
PENGADAAN BARANG & JASA
TA 2013 - 2015

<p>Sumbar, Jambi, Riau, Kepri, Jatim Sulut, Gorontalo, & Kaltim</p>	<p>26 Temuan</p> <p>Kerugian Negara Rp126.629.230.000*</p> <p>Potensi Kerugian Negara Rp47.195.920.000*</p> <p>Kekurangan Penerimaan Rp1.384.360.000*</p>	<p>Bali, NTB, & NTT</p>	<p>13 Temuan</p> <p>Kerugian Negara Rp34.568.840.000*</p> <p>Kekurangan Penerimaan Rp4.731.780.000*</p>
<p>Maluku</p>	<p>8 Temuan</p> <p>Kerugian Negara Rp79.647.100.000*</p>	<p>Papua & Papua barat</p>	<p>25 Temuan</p> <p>Kerugian Negara Rp713.608.380.000*</p> <p>Potensi Kerugian Negara Rp23.675.170.000*</p> <p>Kekurangan Penerimaan Rp4.052.080.000*</p>

*) Lampiran 2.1 IHPS II 2017

KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Pengadaan Barang dan Jasa TA 2013-2015 belum sepenuhnya sesuai dengan UU No. 1/2010 Tentang Perbendaharaan Negara, Perpres No. 54/2010 serta Perubahannya, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14/2012, dan Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kontrak.

**HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2013-2015 PADA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DAN SUMBER
DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT DI SUMATERA BARAT, JAMBI,
RIAU, KEP. RIAU, JAWA TIMUR, SULAWESI UTARA,
GORONTALO DAN KALIMANTAN TIMUR**

TUJUAN DAN HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan simpulan atas kesesuaian atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Kalimantan Timur

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2010 beserta perubahannya, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 dan ketentuan dalam kontrak beserta aturan pelaksanaannya. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya beberapa permasalahan signifikan sebagai berikut:

NO	TEMUAN
Direktorat Jenderal Bina Marga	
1	Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi pada 4 (empat) paket pekerjaan di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) wilayah I Provinsi Sumatera Barat
2	Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi pada 2 (dua) paket pekerjaan di Satker PJN wilayah II Provinsi Sumatera Barat
3	Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi pekerjaan peningkatan struktur Jalan Sri Sudewi (Kuala Tungkal) di Satker PJN wilayah I Provinsi Jambi
4	Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi pada 5 (lima) paket pekerjaan di Satker PJN wilayah II Provinsi Jambi
5	Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi pada 4 (empat) paket pekerjaan di Satker PJN wilayah I Provinsi Riau

6	Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi pada 2 (dua) paket pekerjaan di Satker P2JN wilayah II Provinsi Riau
7	Kelebihan pembayaran pengawasan penanganan Jalan Duri – Kandis Cs Tahun 2014 pada Satker P2JN Provinsi Riau
8	Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Konsultansi Survei IRMS pada Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Provinsi Riau
9	Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi pada 6 (enam) paket pekerjaan di Satker P2JN Provinsi Kepulauan Riau
10	Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pengawasan teknik jalan dan jembatan pada Satker P2JN Provinsi Jawa Timur
11	Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi pada 4 (empat) paket pekerjaan di Satker P2JN wilayah I Provinsi Sulawesi Utara
12	Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi pada 2 (dua) paket pekerjaan di Satker P2JN wilayah II Provinsi Sulawesi Utara
13	Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi pada 5 (lima) paket pekerjaan di Satker P2JN wilayah III Provinsi Sulawesi Utara
14	Kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan rekonstruksi/peningkatan struktur Jalan Ruas Melonguane - Beo - Esang (APBN-P) (PA1) pada PPK 16 Satker P2JN wilayah III Provinsi Sulawesi Utara TA 2015
15	Tiga paket pekerjaan pada BPJN (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) XI Manado belum selesai dikerjakan pada akhir TA 2015
16	Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi pada 5 (lima) paket pekerjaan di Satker P2JN Provinsi Gorontalo
17	Kelebihan pembayaran pada 4 (empat) paket pekerjaan jasa konsultansi pengawasan teknis pada Satker P2JN (Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional) Provinsi Gorontalo

18	Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi pada 3 (tiga) paket pekerjaan di Satker P2JN wilayah I Provinsi Kalimantan Timur
19	Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi pada paket peningkatan struktur Jalan Simpang Perdaun – Batu Ampar II (MYC) di Satker P2JN wilayah II Provinsi Kalimantan Timur TA 2014
20	Kelebihan pembayaran pada 14 paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan teknis pada Satker P2JN Provinsi Kalimantan Timur TA 2014 dan TA 2015
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	
21	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan pada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI Provinsi Jambi
22	Kekurangan volume pada 8 (delapan) paket pekerjaan di BWS Sulawesi I Provinsi Sulawesi Utara
23	Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi pada 4 (empat) paket pekerjaan di BWS (Balai Wilayah Sungai) Sulawesi II Provinsi Gorontalo
24	kelebihan pembayaran pada 3 (tiga) paket pekerjaan supervisi TA 2014 dan 2015 di BWS Sulawesi II Provinsi Gorontalo
25	Kelebihan pembayaran pelaksanaan pekerjaan pada BWS Kalimantan III Provinsi Kalimantan Timur TA 2015
26	Kelebihan Pembayaran pada 6 (Enam) Paket Pekerjaan Supervisi pada BWS Kalimantan III Provinsi Kalimantan Timur TA 2014 dan TA 2015

**HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2013-2015 PADA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DAN SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT DI MALUKU**

TUJUAN DAN HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan simpulan atas kesesuaian atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Maluku.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kontrak. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya beberapa permasalahan signifikan sebagai berikut:

NO	TEMUAN
Direktorat Jenderal Bina Marga	
1	Terdapat item-item pekerjaan pada 4 (empat) paket pekerjaan ruas Jalan Ilwaki-Lurang Pulau Wetar TA 2013 s.d. 2015 tidak dilaksanakan penyedia jasa dan kekurangan volume pada 3 (tiga) paket pekerjaan
2	Terdapat kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pada 3 (tiga) paket pekerjaan fisik pada SNVT (Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu) P2JN Wilayah I Provinsi Maluku
3	Terdapat Kekurangan Volume Dan Tidak Terpenuhinya Spesifikasi Minimum Pada 8 (Delapan) Paket Pekerjaan Fisik pada SNVT P2JN Wilayah II Provinsi Maluku
4	Terdapat kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimal pada 6 (enam) paket pekerjaan fisik pada SNVT P2JN Wilayah III Provinsi Maluku
5	Terdapat kelebihan pembayaran biaya personil dan non personil paket pekerjaan konsultansi pada SNVT P2JN Provinsi Maluku

6	Pembayaran biaya langsung personil dan biaya langsung non personil atas pekerjaan konsultansi pengawasan pekerjaan rekonstruksi/peningkatan struktur Jalan Lurang-Ilwaki PA1 Tahun 2015 tidak sesuai ketentuan
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	
7	Terdapat kekurangan volume pada 4 (empat) paket pekerjaan fisik pada Satker PJPA BWS Provinsi Maluku
8	Terdapat kekurangan volume pada pekerjaan normalisasi alur dan perkuatan tebing/tanggul Sungai Way Lola TA 2015

**HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2013, 2014, DAN
2015 PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT DI
BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA
TIMUR**

TUJUAN DAN HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan simpulan atas kesesuaian atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kontrak. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya beberapa permasalahan signifikan sebagai berikut:

NO	TEMUAN
Direktorat Jenderal Bina Marga	
1	Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi pada tiga paket pekerjaan di Satker PJJN Metropolitan Denpasar
2	Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi pada tiga paket pekerjaan di Satker PJJN Wilayah II Provinsi Bali
3	Kekurangan volume pada dua paket pekerjaan di Satker PJJN Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Barat
4	Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi pada enam paket pekerjaan di Satker PJJN Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi pada tiga paket pekerjaan di Satker PJJN Wilayah III Provinsi Nusa Tenggara Barat
6	Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi pada tiga paket pekerjaan di Satker PJJN Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Timur

7	Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi pada tiga paket pekerjaan di Satker PJJ Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Timur
8	Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi pada tiga paket pekerjaan di Satker PJJ Wilayah III Provinsi Nusa Tenggara Timur
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	
9	Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan supervisi pembangunan Bendungan Titab di Kabupaten Buleleng
10	Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Bendungan Titab di Kabupaten Buleleng mengalami keterlambatan dan terjadi kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembesian tulangan pada Bangunan Conduit Tipe 7
11	Kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan pembangunan Bendungan Pandanduri pada BWS Nusa Tenggara I
12	Kekurangan volume pada dua paket pekerjaan di Satuan Kegiatan Irigasi dan Rawa II BWS Nusa Tenggara I
13	Kekurangan volume pada pembangunan embung irigasi Oematanunu Kecamatan Kupang Barat di Kabupaten Kupang di SNVT PJJSA Nusa Tenggara II

**HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2013-2015 PADA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DAN SUMBER
DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT DI
PAPUA DAN PAPUA BARAT**

TUJUAN DAN HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan simpulan atas kesesuaian atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Papua dan Papua Barat.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kontrak. Beberapa temuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	TEMUAN
Direktorat Jenderal Bina Marga	
1	Pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan Oksibil – Dekay pada SNVT PJJN Wilayah III Provinsi Papua – Tanah Merah tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran;
2	Perpanjangan waktu yang diberikan kepada penyedia jasa pekerjaan peningkatan struktur jalan Yetti-Ubrub APBN TA 2015 tidak sesuai ketentuan dan terdapat kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis
3	Terdapat optimasi pekerjaan dan pembayaran dalam rangka mengakomodir penyedia jasa yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu kontrak dan kekurangan volume pekerjaan serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis;
4	Terdapat pengalihan pekerjaan melalui addendum pada pekerjaan rekonstruksi/peningkatan struktur jalan depapre - bongkrang 2015 untuk mengakomodir ketidakmampuan penyedia jasa dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan kekurangan volume pekerjaan;

5	Pelaksanaan 5 (lima) paket pekerjaan melewati tahun anggaran tidak sesuai ketentuan dan terdapat kurang volume pekerjaan serta sanksi denda keterlambatan belum dikenakan kepada penyedia jasa;
6	Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pada 8 (delapan) paket pekerjaan fisik pada SNVT P2JN Wilayah I Provinsi Papua – Jayapura;
7	Kelebihan pembayaran pada 9 (sembilan) paket pekerjaan fisik pada SNVT P2JN Wilayah II Provinsi Papua – Merauke;
8	Kelebihan pembayaran pada 7 (tujuh) paket pekerjaan fisik pada SNVT P2JN Wilayah III Provinsi Papua – Tanah Merah;
9	Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pada 3 (tiga) paket pekerjaan fisik pada SNVT P2JN Wilayah IV Provinsi Papua – Jayawijaya;
10	Kekurangan volume dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pada 10 (sepuluh) paket pekerjaan fisik pada SNVT P2JN Wilayah I Papua Barat – Manokwari;
11	Kelebihan pembayaran pada 6 (enam) paket pekerjaan fisik pada SNVT P2JN Wilayah II Papua Barat – Sorong;
12	Harga satuan timpang dan kekurangan volume pada 3 (tiga) paket pekerjaan fisik pada SNVT P2JN Wilayah III Papua Barat – Maybrat;
13	Kelebihan pembayaran pada 19 (sembilan belas) paket pekerjaan fisik pada SNVT P2JN Wilayah IV Papua Barat – Bintuni;
14	Harga satuan timpang dan kekurangan volume pada 8 (delapan) paket pekerjaan fisik pada SNVT P2JN Wilayah V Papua Barat – Fakfak;
15	Kelebihan pembayaran pada 13 (tiga belas) paket pekerjaan konsultansi pada SNVT P2JN Papua dan pekerjaan konsultansi pengawasan/ supervisi tidak layak dibayarkan;
16	Kelebihan pembayaran pada 18 (delapan belas) paket pekerjaan konsultansi pada SNVT P2JN Papua Barat;

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	
17	Kekurangan volume pada 4 (empat) paket pekerjaan fisik pada SNVT PJPA Provinsi Papua;
18	Kekurangan volume 2 (dua) paket pekerjaan fisik pada SNVT PJPA Provinsi Papua – Merauke;
19	Harga satuan timpang dan kekurangan volume pada 3 (tiga) paket pekerjaan fisik pada SNVT PJSA Provinsi Papua;
20	Kelebihan pembayaran pada 11 (sebelas) paket pekerjaan fisik pada SNVT PJPA Provinsi Papua Barat;
21	Harga satuan timpang dan kekurangan volume pada 8 (delapan) paket pekerjaan fisik pada SNVT PJSA Provinsi Papua Barat;
22	Kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan konsultasi pada SNVT PJPA Provinsi Papua;
23	Kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan konsultasi pada SNVT PJSA Provinsi Papua;
24	Kelebihan pembayaran pada 8 (delapan) paket pekerjaan konsultasi pada SNVT PJPA Provinsi Papua Barat
25	Kelebihan pembayaran pada 2 (dua) paket pekerjaan konsultasi pada SNVT PJSA Provinsi Papua Barat

 **HASIL PEMERIKSAAN
OPERASIONAL JALAN TOL**



KESIMPULAN PEMERIKSAAN

"Pengelolaan operasional jalan tol pada Kementerian PUPR, BPJT dan BUJT berkaitan dengan kelancaran lalu lintas pada kebijakan tarif tol **BELUM EFEKTIF** dalam aspek perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi"

1. Memperbaiki SOP dalam pemeriksaan Jalan Tol
2. Evaluasi komprehensif pada aspek kelancaran lalu lintas.
3. Sosialisasi atau promosi secara intensif atas pembayaran elektronik khususnya e-payment multi bank
4. Kajian komprehensif terhadap penerapan integrasi sistem pembayaran dan dampaknya
5. Menjadikan tingkat pelayanan, pemenuhan SPM dan Kondisi daya beli masyarakat sebagai pertimbangan penyesuaian tarif
6. Melakukan penyesuaian tarif tol pada ruas jalan Jakarta-Cikampek serta JORR dengan nilai inflasi

REKOMENDASI BPK

7. Meminta kepada BUJT laporan penghitungan pendapatan tol berdasarkan perubahan golongan pengguna tol dan selanjutnya digunakan sebagai bahan pemeriksaan oleh auditor pemerintah
8. Menetapkan batas waktu penyerahan laporan penghitungan pendapatan tol berdasarkan perubahan golongan pengguna jalan tol dan jika melebihi batas waktu tsbt, BPJT agar melakukan perhitungan sendiri
9. Melakukan evaluasi kebijakan pemberian masa konsesi dan tarif atas 13 ruas jalan tol yang sudah beroperasi dan dikelola oleh PT JM, dengan menerapkan masa konsesi secara individual dan mengeluarkan biaya operasional kantor pusat dari perhitungan masa konsesi masing-masing ruas,

Temuan-temuan kelemahan yang diungkap oleh BPK RI dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	TEMUAN
Perencanaan Operasional Jalan Tol	
1	Kementerian PUPR dan BPJT belum mempunyai perencanaan untuk mengatasi permasalahan kelancaran lalu lintas di jalan tol
Pelaksanaan Operasional Jalan Tol	
2	Ukuran/standar kecepatan tempuh rata-rata pada standar pelayanan minimal jalan tol belum sejalan dengan ukuran tingkat pelayanan bagi jalan tol yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan
3	Proses penilaian pemenuhan standar pelayanan minimal belum memadai dan terdapat beberapa jalan tol yang tidak memenuhi standar pada aspek kelancaran lalu lintas
4	Tingkat pelayanan beberapa jalan tol di Jabodetabek tidak memenuhi ketentuan dan BPJT tidak melakukan penilaian atas tingkat pelayanan jalan tol
5	Kewajiban pelebaran jalan pada ruas jalan tol Jakarta - Tangerang, dan Jakarta - Bogor - Ciawi (Jagorawi) belum dipenuhi
6	Penerapan transaksi Pembayaran Elektronik (<i>E-Payment</i>) pada beberapa gerbang tol belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi panjang antrian
7	BPJT Belum melakukan koordinasi yang optimal dengan instansi lain untuk mengatasi permasalahan yang menghambat kelancaran lalu lintas harian di jalan tol
8	Kebijakan penerapan integrasi sistem pembayaran pada Jalan Tol Trans Jawa dalam menghadapi lalu lintas lebaran Tahun 2016 tidak didukung kajian/rencanaantisipasi yang memadai
9	Kenaikan tarif tol belum mempertimbangkan pemenuhan pelayanan atas kelancaran lalu lintas dan kondisi daya beli masyarakat serta terdapat kenaikan yang melebihi kenaikan laju inflasi

10	BPJT belum melakukan evaluasi/kajian atas besar keuntungan biaya operasi kendaraan pada jalan tol yang mengalami kemacetan terhadap besarnya tarif tol
Pemantauan dan Evaluasi Operasional Jalan Tol	
11	Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan BPJT terhadap pemenuhan kewajiban BUJT belum memadai
12	BPJT belum membuat Laporan Hasil Pemantauan Operasional dan Pemeliharaan secara memadai
13	BPJT tidak melakukan evaluasi tingkat pelayanan dan belum menindaklanjuti hasil kajian dengan optimal
14	BPJT belum melakukan penyesuaian tarif atau masa konsesi berdasarkan perubahan golongan kendaraan pengguna jalan tol
15	Kebijakan Tarif atas Konsesi 13 Ruas Jalan Tol yang dikelola PT JM sebelum Tahun 2005 tidak sepenuhnya sesuai ketentuan sehingga masyarakat pengguna jalan tol terbebani tarif yang tidak riil

Temuan yang dibahas lebih lanjut pada **pokok-pokok kelemahan** yang ditemukan oleh BPK RI, **yang dapat mengganggu pengelolaan operasional jalan tol** pada Kementerian PUPR, BPJT dan BUJT berkaitan dengan kelancaran lalu lintas dan kebijakan tarif tol yaitu **temuan pada pelaksanaan operasional jalan tol nomor 3, 6, 8, 9 dan temuan pada Pemantauan dan Evaluasi Operasional Jalan Tol nomor 14, 15**



HASIL PEMERIKSAAN



Regulasi
&
Perencanaan



Kegiatan
Pembangunan
Desa dan Kawasan
Perdesaan



Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Melalui Kegiatan
Pendamping



Monitoring
&
Evaluasi



KESIMPULAN PEMERIKSAAN

"Strategi Bidang Desa dan Kawasan Perdesaan dalam rangka mendukung efektivitas Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Tahun 2016 s.d. Semester I 2017 **BELUM EFEKTIF** dalam aspek regulasi, perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan"

1. Menetapkan pedoman umum pembangunan desa yang telah dibahas bersama dengan Bappenas, Kemendagri, dan kementerian terkait lainnya.

REKOMENDASI BPK

2. Membangun sistem informasi desa yang terintegrasi dari seluruh UKE-1 sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
3. Membuat kajian peran dan fungsi TKPKP baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota
4. Menyusun dan menetapkan *road map* kegiatan pendampingan desa
5. Membuat sistem monitoring dan evaluasi secara komprehensif untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan signifikan pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara sektoral

Temuan-temuan kelemahan yang diungkap oleh BPK RI dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	TEMUAN
A. Regulasi dan Perencanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	
1	Kemendesa PDTT belum menetapkan pedoman umum pelaksanaan pembangunan desa
2	Kemendesa PDTT belum memiliki pedoman umum pemberdayaan masyarakat desa dan pendampingan masyarakat desa
3	Pedoman umum pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan yang ditetapkan Kemendesa PDTT belum memadai
4	Regulasi pendampingan kawasan perdesaan belum memadai
5	Ketersediaan informasi dan data desa belum mendukung efektivitas Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
6	Koordinasi perencanaan program dan kegiatan sektoral di desa belum mendukung efektivitas program pembangunan desa dan kawasan perdesaan
7	Ketersediaan informasi dan data kawasan perdesaan belum mendukung efektivitas Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
8	Perencanaan kawasan perdesaan belum mendukung efektivitas Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
9	Perencanaan ketersediaan Tenaga Pendamping Profesional dan Pendamping Kawasan Perdesaan belum mendukung efektivitas Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
10	Kemendesa PDTT belum merencanakan monitoring dan evaluasi pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara memadai
B. Kegiatan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	
11	Program dan kegiatan sektoral Kemendesa PDTT belum mendukung pembangunan desa

12	Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa belum memadai
13	Koordinasi atas kegiatan pembangunan kawasan perdesaan dengan pemerintah daerah tidak memadai
14	Struktur tim koordinasi pembangunan kawasan perdesaan pusat dan daerah belum seluruhnya terbentuk
C. Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Kegiatan Pendampingan	
15	Jumlah Tenaga Pendamping Profesional belum terpenuhi dan belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
16	Pelaksanaan kontrak kerja Tenaga Pendamping Profesional belum memadai
17	Pelaksanaan Tugas Pendampingan Tenaga Pendamping Profesional Belum sesuai dengan pedoman
18	Struktur Tenaga Pendamping Profesional yang telah ditetapkan kemendesa belum memadai
19	Proses Rekrutmen Pendamping Kawasan Perdesaan belum memadai sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan Peraturan tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
20	Pelatihan atas Pendamping Kawasan Perdesaan belum dilaksanakan secara memadai
21	Kontrak Kerja Pendamping Kawasan Perdesaan belum memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas
22	Pelaksanaan Tugas Pendampingan Kawasan Perdesaan belum mengacu pada Kontrak Kerja Maupun Pedoman dan Panduan Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan
23	Koordinasi antara Pendamping Kawasan Perdesaan dan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di kawasan perdesaan belum memadai untuk mendukung tujuan pembangunan kawasan perdesaan
24	Struktur Organisasi Pendamping Kawasan perdesaan belum memadai untuk mendukung pencapaian tujuan pendampingan kawasan perdesaan

D. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	
25	Monitoring kegiatan sektoral pembangunan desa belum memadai
26	Monitoring kegiatan sektoral pembangunan kawasan perdesaan belum memadai
27	Pelaksanaan monitoring pendamping pembangunan kawasan perdesaan belum memadai
28	Kegiatan monitoring dan evaluasi Tenaga Pendamping Profesional belum memadai
29	Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Pembangunan Dan Pendampingan Desa belum ditindaklanjuti
30	Hasil monitoring dan evaluasi atas Pembangunan Kawasan Perdesaan belum ditindaklanjuti